



**BerAKHLAK**  bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani  
bangsa

# RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN  
2025-2029





## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pacitan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan karena adanya penyusunan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perhubungan disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pacitan, 19 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198809 1 001



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1 Gambaran Dinas Perhubungan.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.....	17
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan.....	17
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan .	22
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan .....	41
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan .....	42
2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.....	44
2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas Perhubungan .....	45
2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	45
2.9 Telaah Proyek Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan.....	46
2.10 Isu Strategis .....	49
2.10.1 Isu Global.....	49
2.10.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	50
2.10.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.....	51



2.10.4	Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029 .....	52
2.10.5	Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2025-2029 .....	53
2.10.6	Potensi Daerah .....	53
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>		<b>58</b>
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	58
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>		<b>74</b>
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....	74
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>93</b>
5.1	Kesimpulan .....	93
5.2	Kaidah Pelaksanaan .....	94
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	95



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB I

## PENDAHULUAN





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perhubungan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perhubungan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber



daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan berkaitan dengan urusan Perhubungan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;



26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat
- 2.6 Mitra Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat dalam pemberian pelayanan (jika ada)
- 2.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat (jika ada)



- 2.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat (jika ada)
- 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.10 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.11 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 2.12 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.13 Penentuan isu-isu strategis

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam lima tahun mendatang.

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan.



## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Dinas Perhubungan**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang didukung Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas urusan bidang perhubungan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Prasarana Transportasi; dan
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian keselamatan transportasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Prasarana Transportasi;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun tugas dari masing-masing:

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit di lingkungan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b) Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, dan kepegawaian;
- c) Pemberian dukungan pelayanan administrasi Perencanaan dan Keuangan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri dari :



- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b) menyiapkan dan melaksanakan penataksanaan rumah tangga;
- c) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d) menyiapkan dan Melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e) menyiapkan dan Melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g) memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perparkiran. Bidang Lalu



Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen lalu lintas dan angkutan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan;
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3. Bidang Prasarana Transportasi

Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi, dan Penerangan Jalan Umum. Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan



c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang prasarana transportasi terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi

Bidang Pengembangan Pengendalian Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian dan keselamatan transportasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;

b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;

c) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan

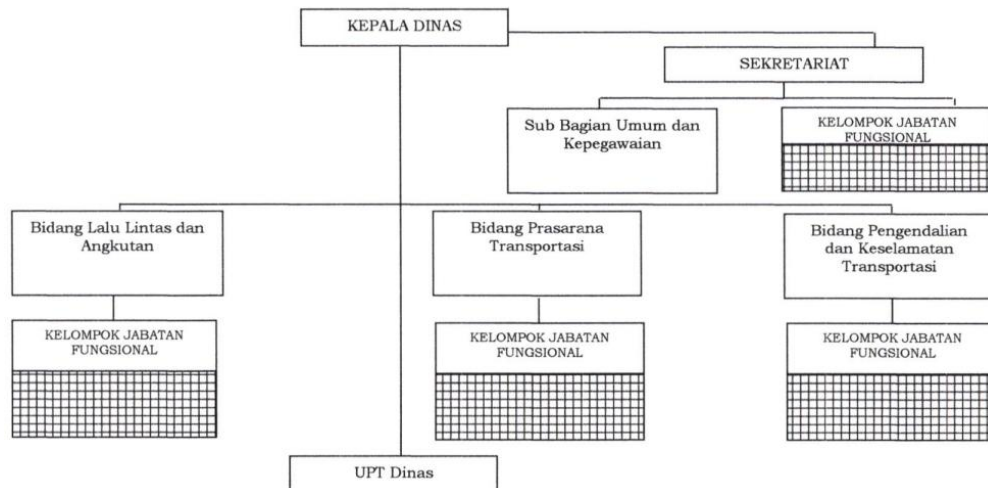
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan



ketrampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas meliputi:
  - 1) Menyusun rencana program kerja pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - 2) Menyelenggaraan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - 3) Melaksanakan Pembinaan terhadap seluruh pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

*Sumber: Peraturan Bupati Pacitan Nomor 206 Tahun 2021*

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perhubungan.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perhubungan sesuai struktur organisasi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebanyak 126 Orang berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, yang terdiri dari:



1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 32
2. PPPK : 3
3. Non ASN : 91

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebanyak 126 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-3 : 1
2. Sarjana S-2 : 3
3. Sarjana S-1 : 9
4. Diploma -3 : 3
5. SMA/Sederajat : 110

### **2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Barang	Keadaan		Mutasi / Perubahan				Keadaan		Ket
				Per 01 Januari 2024		Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024				31 Desember 2024		
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Bertambah		Berkurang		Jumlah Barang	Jumlah Harga	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	.	BARANG PAKAI HABIS	13.229	169.841.061	19.273	347.420.430	27.208	464.808.191	5.294	52.453.300	
2		01.01	BAHAN	0	0	114.00	4.759.260	114.00	4.759.260	0	0	
3		01.01.01	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	0	0	114.00	4.759.260	114.00	4.759.260	0	0	
8		01.02	SUKU CADANG	0	0	04.00	7.100.000,00	04.00	7.100.000,00	0	0	
9		01.02.01	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	0	0	04.00	7.100.000,00	04.00	7.100.000,00	0	0	
10		01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	13.229	169.841.061	18.814	325.762.170	26.749	443.149.931	5.294	52.453.300	
11		01.03.01	ALAT TULIS KANTOR	7.609	91.817.740	6.110	57.380.500	13.033	132.009.240	686	17.189.000	
12		01.03.02	KERTAS DAN COVER	19	956.000	1466	25.800.000	1475	26.186.000	10	570.000	
13		01.03.03	BAHAN CETAK	4.517	23.782.900	0	0	1579	1.894.800	2.938	21.888.100	



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Barang	Keadaan		Mutasi / Perubahan				Keadaan		Ket
				Per 01 Januari 2024		Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024				31 Desember 2024		
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Bertambah		Berkurang		Jumlah Barang	Jumlah Harga	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		01.03.04	BENDA POS	0	0	342	3.420.000	342	3.420.000	0	0	
15		01.03.06	BAHAN KOMPUTER	21	2.171.000	120	19.757.000	137	21.459.000	4	469.000	
16		01.03.07	PERABOT KANTOR	22	394.000	325	5.815.000	347	6.209.000	0	0	
17		01.03.08	ALAT LISTRIK	1.041	50.719.421	7295	189.222.170	8336	239.941.591	0	0	
18		01.03.12	BENDA BERHARGA	0	0	3150	23.467.500	1494	11.130.300	1.656	12.337.20	
19		01.03.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	0	0	6	900.000	6	900.000	0	0	
20		01.07	NATURA DAN PAKAN	0	0	341	9.799.000	341	9.799.000	0	0	
21		01.07.01	NATURA	0	0	341	9.799.000	341	9.799.000	0	0	
22	2	.	BARANG TAK HABIS PAKAI	500	4.880.000	0	0	500	4.880.000	0	0	



No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Barang	Keadaan		Mutasi / Perubahan				Keadaan		Ket
				Per 01 Januari 2024		Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024				31 Desember 2024		
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Bertambah		Berkurang		Jumlah Barang	Jumlah Harga	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		02.01	KOMPONEN	500	4.880.000	0	0	500	4.880.000	0	0	
24		02.01.04	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	500	4.880.000	0	0	500	4.880.000	0	0	
GRAND TOTAL				13.729	174.721.061	19.273	347.420.430	27.708	469.688.191	5.294	52.453.300	



### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



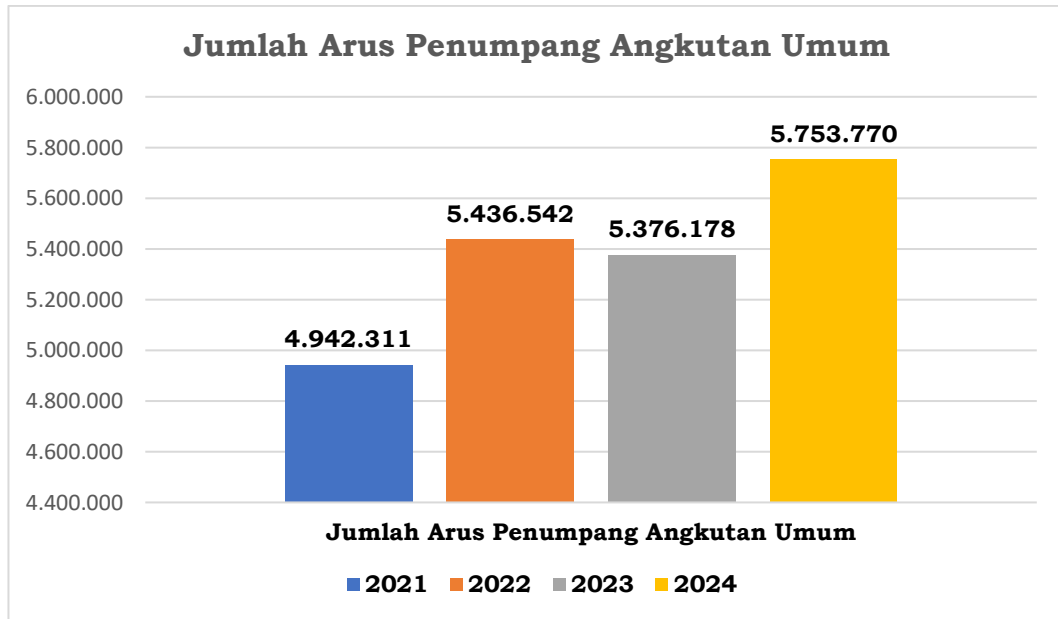
**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

NO	Indikator	IKU	Target	Kondisi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada				Rata-rata	Rata-rata
				Awal	Tahun ke-					Tahun ke-				Tahun ke-				Realisasi	Rasio
				IKK	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian	Capaian
1	2	3	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum			4.408.24,00						4.942.311	5.436.542	5.376.178	5.753.770					6.334.502	
2.	Rasio konektivitas Kabupaten	V	V	0,7						0,7	0,7	0,88	0,88					0,74	
3.	Kinerja lalu lintas kabupaten	V	V	0,2						0,24	0,26	0,27	0,27					0,26	
4.	Rasio uji KIR angkutan umum			33,75						31,15	40,89	88,26	120,70					70,25	
5.	Rasio Ijin trayek			0,0087						0,0085	0,009	0,0086	0,008					0,0085	
6.	Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan	V				79,57%	26,74	27,28			79,57	27,28	28,36		100%	102,02%	103,96%	45,07	
7.	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	V				85,1%	87,10	89,20			85,1	87,14	64,14		100%	100,05%	71,90%	78,79	
8.	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang	V				0,10%	0,09	0,08			0,10	0,08	1,19		100%	88,89%	1.485,09%	0,46	



NO	Indikator	IKU	Target	Kondisi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada				Rata-rata	Rata-rata
			IKK	Awal	2021	2022	2023	2024	Tahun ke-				2021	2022	2023	2024	Realisasi Capaian	Rasio Capaian	
				2020					2021	2022	2023	2024							
1	2	3	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	melibatkan angkutan umum dan angkutan barang																		
9.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	V				39,1%	49,70	60,30		39,1	49,70	61,32		100 %	100 %	101,69%	50,04		
10.	Nilai IKM Perangkat Daerah	V				79,99	81,09	81,60		80,03	80,79	84,20		100,05%	100,37%	103,19%	81,6		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025



**Grafik 2.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*

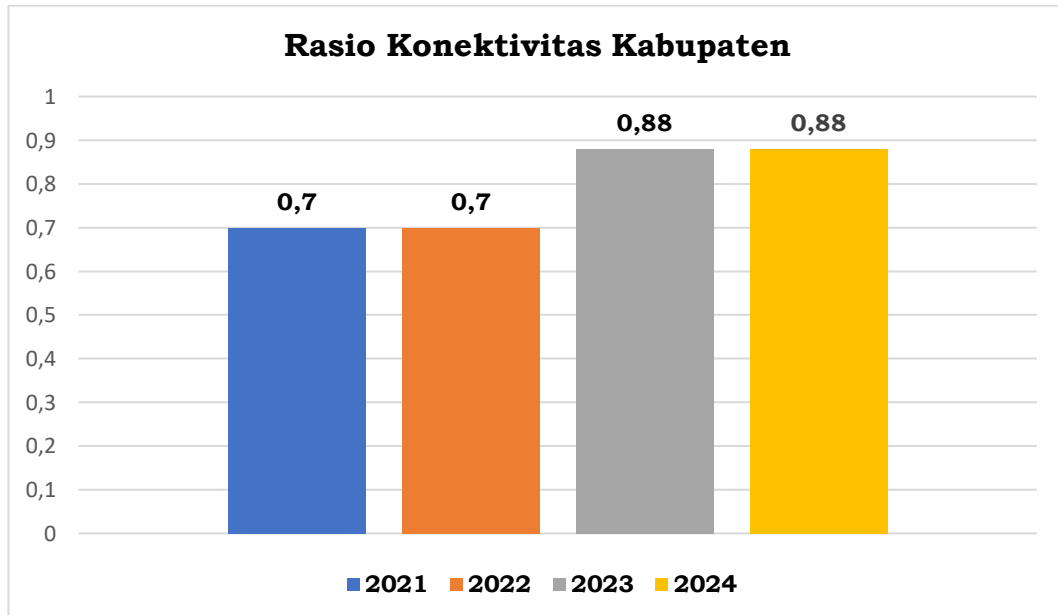
Pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum, Kabupaten Pacitan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam empat tahun terakhir. Dari angka awal 4.942.311 penumpang, jumlah ini meningkat menjadi 5.753.770 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat, yang didukung oleh perbaikan layanan angkutan umum, pemulihan pasca pandemi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi yang lebih andal dan terjangkau. Berdasarkan grafik "Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum", kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan pola yang fluktuatif sebelum mencapai lonjakan luar biasa. Dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah penumpang angkutan umum bergerak secara stagnan. Pada tahun 2021, tercatat 4.942.311 penumpang, lalu meningkat menjadi 5.436.542 di tahun 2022. Namun, di tahun 2023, angka ini kembali menurun sedikit menjadi 5.376.178, menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan sedikit penurunan terhadap angkutan umum. Pola ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut, program-program yang dijalankan hanya berhasil



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

mempertahankan jumlah penumpang yang ada, tanpa mampu menarik pengguna baru secara signifikan.

Namun, di tahun 2024, terjadi peningkatan Jumlah arus penumpang angkutan umum hingga mencapai 5.753.770. Peningkatan ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan strategi atau program baru yang sangat efektif. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kualitas layanan, penambahan rute, peremajaan armada, atau promosi masif yang berhasil mengembalikan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa setelah periode yang stabil, Dinas Perhubungan berhasil melakukan intervensi signifikan di tahun 2024 yang menghasilkan pertumbuhan kinerja luar biasa dan sukses mengoptimalkan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Pacitan.



**Grafik 2.2 Rasio Konektivitas Kabupaten Pacitan**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

Indikator rasio konektivitas kabupaten dan kinerja lalu lintas juga menunjukkan perkembangan positif. Rasio konektivitas



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

meningkat dari angka tetap 0,7 selama tiga tahun menjadi 0,88 di tahun 2024, menandakan adanya peningkatan akses antarwilayah di dalam Kabupaten Pacitan. Sementara itu, kinerja lalu lintas meningkat bertahap dari 0,24 (2021) menjadi 0,27 (2023 dan 2024), menunjukkan efektivitas kebijakan lalu lintas dalam meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan dan penurunan kepadatan.

Berdasarkan grafik yang menunjukkan Rasio Konektivitas Kabupaten, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan sebuah pola yang menarik dan progresif. Selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2021 hingga 2023, rasio konektivitas berada pada angka yang stabil di 0.88. Stabilitas ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan berhasil mempertahankan standar yang sudah ada, namun juga mengindikasikan adanya stagnasi dalam hal peningkatan. Capaian ini bisa dilihat sebagai masa pematapan, di mana fondasi konektivitas telah terbentuk, tetapi belum ada terobosan signifikan untuk meningkatkannya.

Namun, di tahun 2024, terjadi lonjakan kinerja yang sangat impresif. Rasio konektivitas melonjak tajam dari 0.7 menjadi 0.88. Peningkatan sebesar 0.18 poin ini adalah bukti nyata dari keberhasilan program atau kebijakan strategis yang diimplementasikan pada tahun tersebut. Lonjakan ini mencerminkan adanya terobosan yang berhasil mengatasi tantangan sebelumnya, mungkin melalui pembangunan infrastruktur baru, optimalisasi rute transportasi, atau peningkatan kualitas layanan yang membuat akses antar wilayah menjadi jauh lebih efisien. Pencapaian ini mendekati angka ideal 1.0, yang menunjukkan bahwa konektivitas di Kabupaten Pacitan telah mencapai level yang sangat tinggi dan efektif. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa setelah periode yang stabil, Dinas Perhubungan berhasil melakukan intervensi yang



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

tepat dan strategis, menghasilkan peningkatan kinerja yang luar biasa di tahun 2024.



**Gambar Pemeliharaan Traffic light dan Penerimaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha**



**Grafik 2.3 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten**  
*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

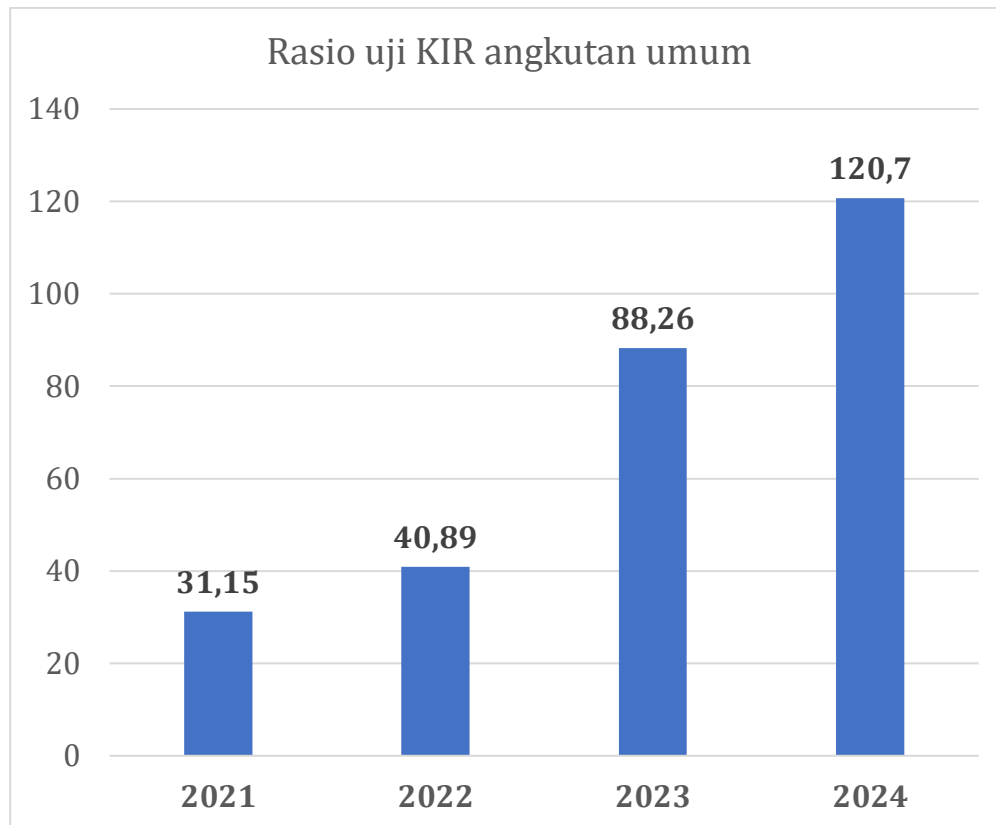
Berdasarkan grafik "Kinerja lalu lintas kabupaten," pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Pada tahun



## **DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

2021, kinerja lalu lintas dimulai pada angka 0.24. Angka ini kemudian menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2022, mencapai 0.26, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan efisiensi lalu lintas. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2023, di mana kinerja lalu lintas mencapai 0.27, menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang berkelanjutan.

Namun, di tahun 2024, angka kinerja lalu lintas menunjukkan kestabilan, tetap berada di 0.27. Meskipun tidak ada peningkatan, stabilitas pada angka yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ini merupakan hal yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perhubungan berhasil mempertahankan standar kinerja yang telah ditingkatkan. Stagnasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, atau volume kendaraan yang padat. Penting bagi Dinas Perhubungan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan lebih lanjut dan merancang strategi baru untuk mencapai efisiensi lalu lintas yang lebih tinggi di masa depan.



**Grafik 2.4 Rasio Uji KIR Angkutan Umum**  
*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

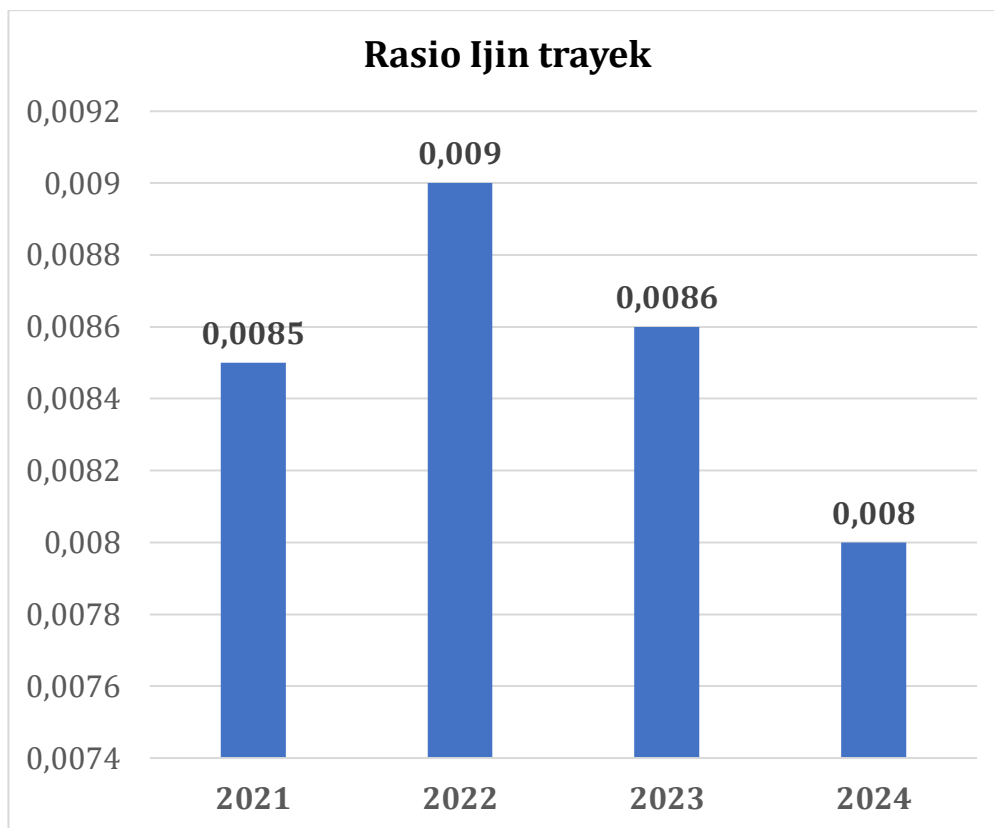
Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan arah pembangunan transportasi di Pacitan yang kian responsif terhadap kebutuhan layanan publik dan keberlanjutan. Berdasarkan grafik "Rasio uji KIR angkutan umum," kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio uji KIR angkutan umum tercatat sebesar 31,15. Angka ini kemudian terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022, rasio meningkat menjadi 40,89, menunjukkan adanya perbaikan dalam pemantauan dan kepatuhan kendaraan angkutan umum.

Peningkatan ini berlanjut pesat di tahun 2023, di mana rasio melonjak menjadi 88,26, yang mengindikasikan bahwa upaya dinas dalam memastikan kelayakan jalan kendaraan semakin intensif dan berhasil. Puncak keberhasilan terjadi di tahun 2024, di mana



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

rasio uji KIR mencapai angka luar biasa, yaitu 120,7. Angka yang melebihi 100 ini menunjukkan bahwa dinas tidak hanya berhasil menguji semua angkutan umum yang ada, tetapi juga mungkin melakukan pengujian ulang, menargetkan angkutan yang sebelumnya tidak terjangkau, atau memasukkan kendaraan baru ke dalam program pengujian. Tren ini secara jelas merefleksikan dedikasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas angkutan umum di Kabupaten Pacitan.



**Grafik 2.5 Rasio Ijin Trayek**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

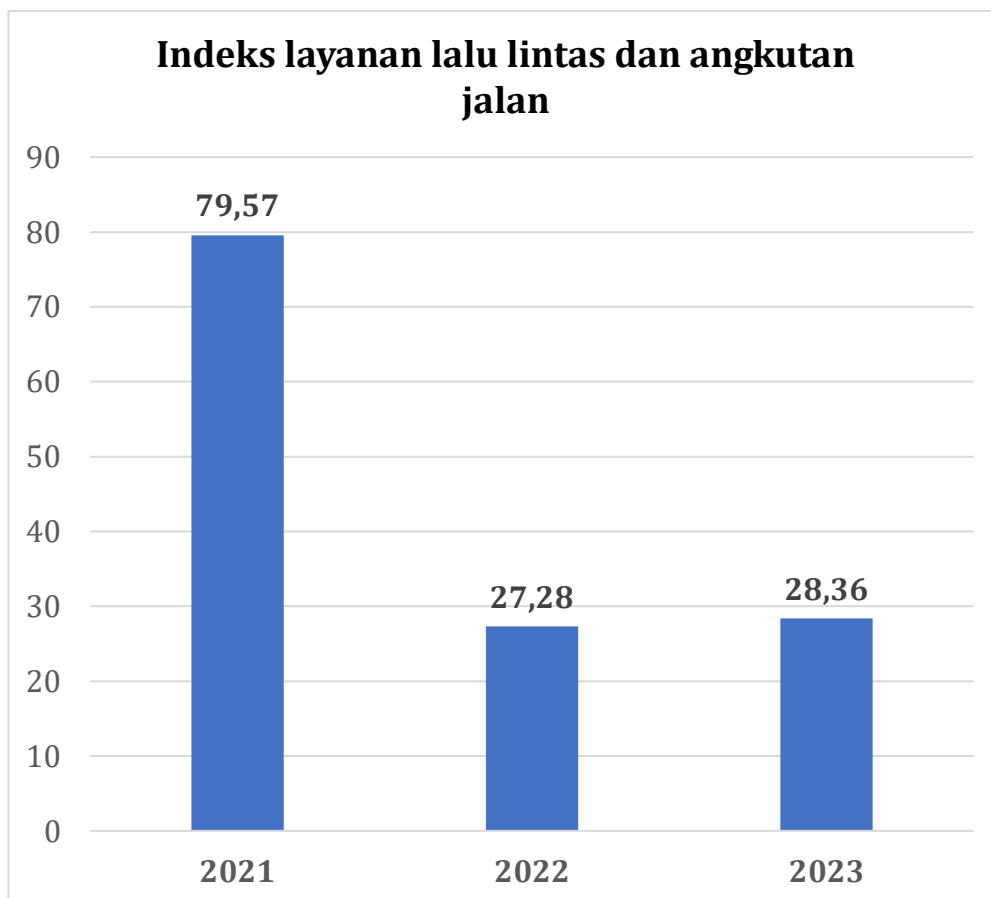
Berdasarkan grafik "Rasio Ijin Trayek", kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati. Pada tahun 2021, rasio izin trayek berada di angka 0.0085, yang kemudian meningkat tipis menjadi 0.009 di tahun



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perizinan atau penambahan jumlah trayek yang berizin.

Namun, tren positif ini tidak berlanjut. Di tahun 2023, rasio menurun menjadi 0.0086 dan terus mengalami penurunan drastis hingga 0.008 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya beberapa kemungkinan, seperti kesulitan dalam memperpanjang izin trayek, berkurangnya minat pengusaha angkutan untuk mengurus izin, atau adanya pengetatan regulasi yang membuat rasio menurun. Meskipun angkanya terlihat kecil, tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang harus segera diatasi oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan operasional angkutan umum di Kabupaten Pacitan.



**Grafik 2.6 Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*



Berdasarkan grafik "Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan", kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan fluktuasi yang drastis. Pada tahun 2021, indeks layanan mencapai angka sangat tinggi, yaitu 79,57. Capaian ini menandakan bahwa layanan lalu lintas dan angkutan jalan di tahun tersebut dinilai sangat efektif dan memuaskan.

Namun, di tahun 2022, terjadi penurunan tajam yang signifikan, di mana indeks layanan anjlok ke angka 27,28. Penurunan lebih dari 50 poin ini menunjukkan adanya permasalahan besar yang memengaruhi kualitas layanan, seperti menurunnya kualitas infrastruktur, kurangnya efisiensi layanan, atau adanya keluhan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik. Meskipun di tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 28,36, angka ini masih jauh di bawah capaian tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tersebut dan merancang strategi komprehensif untuk mengembalikan atau bahkan melampaui standar kinerja yang pernah dicapai pada tahun 2021.



**Grafik 2.7 Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan**

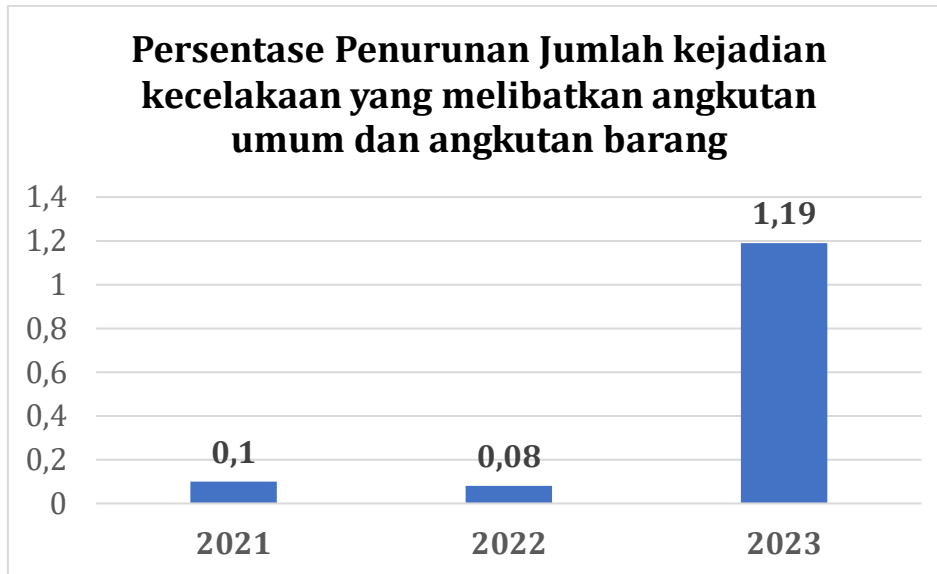
*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Berdasarkan grafik "Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan," kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan mencapai 85,1%, angka yang cukup tinggi. Kinerja ini bahkan sedikit meningkat di tahun 2022, mencapai 87,14%. Tren positif ini mencerminkan komitmen dinas dalam memastikan keselamatan dan kelayakan angkutan umum.

Namun, di tahun 2023, terjadi penurunan drastis yang membawa persentase anjlok menjadi 64,14%. Penurunan tajam sebesar lebih dari 20% ini menunjukkan adanya kegagalan signifikan dalam mempertahankan standar yang telah dicapai. Ada dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab kegagalan ini. Pertama, penerapan aturan baru yang menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan angkutan umum mungkin menciptakan hambatan administratif baru bagi para pelaku usaha, sehingga banyak yang kesulitan atau tidak mampu memperbarui izin dan sertifikasi keselamatan mereka. Kedua, penurunan penghasilan angkutan umum akibat persaingan ketat dengan transportasi daring (online) juga diduga kuat menjadi penyebab. Pendapatan yang menurun membuat para pemilik angkutan umum kesulitan untuk membiayai perbaikan dan perawatan rutin yang diperlukan agar kendaraan mereka tetap memenuhi standar keselamatan. Akibatnya, banyak angkutan umum yang akhirnya tidak lolos uji kelayakan, menyebabkan penurunan drastis pada persentase yang ditampilkan dalam grafik. Dinas Perhubungan perlu segera mengevaluasi dan mengatasi kedua isu ini agar standar keselamatan dapat ditingkatkan kembali.



**Grafik 2.8 Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang**  
*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

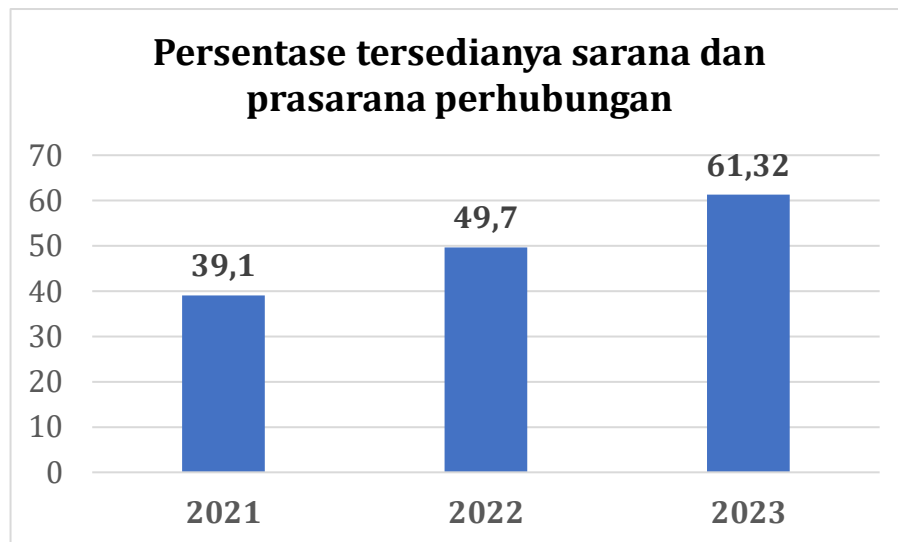
Berdasarkan grafik "Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang," kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2021, terjadi penurunan kecelakaan sebesar 0.1%, yang kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 0.08%. Pola ini menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan sedikit kemunduran dalam upaya menekan angka kecelakaan di awal periode.

Namun, di tahun 2023, terjadi lompatan signifikan di mana persentase penurunan kecelakaan melonjak drastis hingga 1.19%. Peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya ini merupakan bukti keberhasilan program yang dijalankan oleh dinas. Keberhasilan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari kolaborasi atau inisiatif baru yang diterapkan secara efektif, seperti operasi gabungan dengan pihak kepolisian, penertiban kendaraan tidak layak jalan, atau program sosialisasi keselamatan yang lebih masif. Meskipun demikian, capaian ini juga dapat dikaitkan dengan tantangan eksternal, yaitu kurangnya kesadaran hukum



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

masyarakat dalam berlalu lintas yang sering menjadi pemicu utama kecelakaan. Oleh karena itu, lonjakan penurunan ini menjadi bukti bahwa intervensi yang dilakukan dinas, baik dalam penindakan maupun edukasi, mulai membuahkan hasil dalam mengatasi masalah fundamental tersebut.



**Grafik 2.9 Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

Berdasarkan grafik "Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang," kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2021, terjadi penurunan kecelakaan sebesar 0.1%, yang kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 0.08%. Pola ini menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan sedikit kemunduran dalam upaya menekan angka kecelakaan di awal periode.

Namun, di tahun 2023, terjadi lompatan signifikan di mana persentase penurunan kecelakaan melonjak drastis hingga 1.19%. Peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya ini merupakan bukti keberhasilan program yang dijalankan oleh dinas. Keberhasilan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari

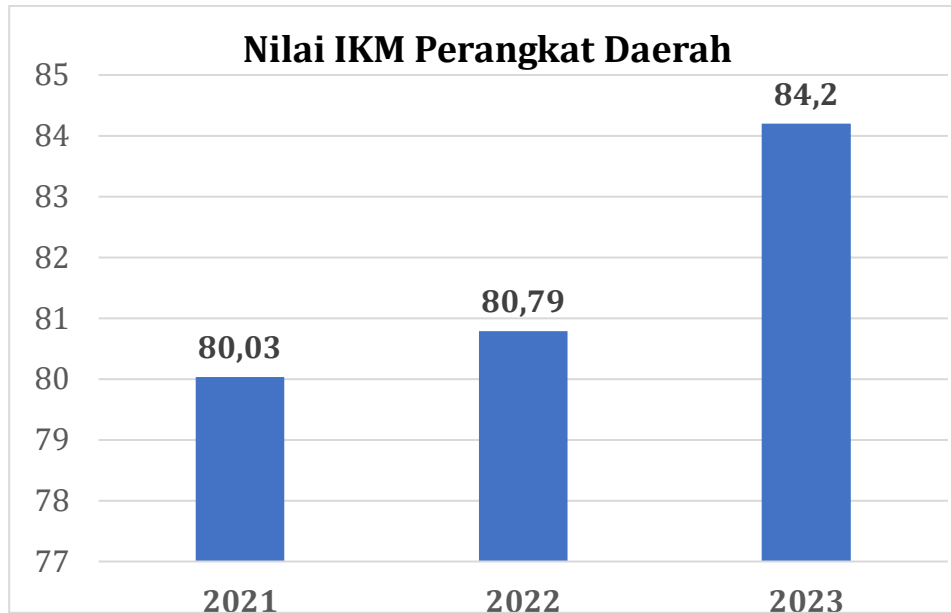


## **DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

kolaborasi atau inisiatif baru yang diterapkan secara efektif, seperti operasi gabungan dengan pihak kepolisian, penertiban kendaraan tidak layak jalan, atau program sosialisasi keselamatan yang lebih masif. Meskipun demikian, capaian ini juga dapat dikaitkan dengan tantangan eksternal, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang sering menjadi pemicu utama kecelakaan. Oleh karena itu, lonjakan penurunan ini menjadi bukti bahwa intervensi yang dilakukan dinas, baik dalam penindakan maupun edukasi, mulai membuahakan hasil dalam mengatasi masalah fundamental tersebut.

Peningkatan ini kemungkinan besar didorong oleh beberapa hal, seperti komitmen politik dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang menjadikan sektor perhubungan sebagai prioritas. Efisiensi dalam pemanfaatan dana juga menjadi faktor kunci, di mana dinas mampu memaksimalkan setiap anggaran yang tersedia untuk perbaikan dan pengadaan fasilitas. Selain itu, kolaborasi yang baik dengan pihak terkait seperti instansi lain dan pihak swasta juga dapat mempercepat proses pembangunan dan pemeliharaan.

Meskipun trennya positif, tantangan tetap ada. Salah satu penghambat utama adalah keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil untuk pembangunan dan pemeliharaan. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbukit-bukit juga dapat menjadi hambatan teknis, membuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lebih sulit dan mahal. Selain itu, faktor cuaca dan bencana alam seperti longsor atau banjir dapat merusak sarana prasarana yang sudah ada, membutuhkan biaya dan waktu ekstra untuk perbaikan. Meskipun demikian, tren yang ditunjukkan dalam grafik membuktikan bahwa Dinas Perhubungan berhasil mengatasi sebagian besar tantangan ini.



**Grafik 2.10 Nilai IKM Perangkat Daerah**  
*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan*

Berdasarkan grafik "Nilai IKM Perangkat Daerah," kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan memuaskan. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2021 tercatat 80,03, yang merupakan angka yang cukup baik. Kinerja ini terus meningkat secara stabil menjadi 80,79 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan nilai luar biasa sebesar 84,2. Kenaikan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan dinas semakin efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Peningkatan IKM ini didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, baik dalam hal kecepatan, keramahan, maupun responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Inovasi digital juga bisa menjadi pendorong kuat, misalnya dengan adanya layanan online untuk pengurusan dokumen perhubungan yang mempermudah masyarakat. Selain itu, komitmen pimpinan dan staf untuk terus



## **DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

memperbaiki diri dan berorientasi pada kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam mencapai nilai yang tinggi.

Meskipun trennya positif, tantangan tetap ada. Salah satu faktor penghambat mungkin adalah keterbatasan sumber daya manusia atau anggaran yang dapat membatasi kecepatan dan cakupan perbaikan layanan. Tantangan teknis seperti infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah juga bisa menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Namun, data menunjukkan bahwa dinas berhasil mengatasi hambatan-hambatan ini dengan baik, sehingga mampu terus meningkatkan kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun.



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata Rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Rencana	Realisasi
	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.099.472.796	4.927.185.123	5.220.195.059	13.698.208.532	4.685.733.406	4.997.521.528	97,15%	95.10%	95.7%	287,16	290,73
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.948.498.000	2.415.564.400	2.739.664.000	3.907.416.470	2.392.225.370	2.683.843.040	98,95%	99.03%	97.96%	131,73	131,66

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*



Berdasarkan data rencana dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, terlihat adanya dinamika dalam penyerapan anggaran pada berbagai program dan kegiatan. Secara umum, realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan variasi, di mana beberapa kegiatan memiliki tingkat penyerapan yang cukup tinggi, bahkan melebihi target yang direncanakan, seperti pada kegiatan evaluasi kinerja. Hal ini dapat didukung oleh perencanaan yang matang, proses pelaksanaan yang efisien, serta koordinasi yang baik antar unit kerja. Namun, terdapat pula kegiatan dengan tingkat realisasi yang lebih rendah dari target, seperti pada penyusunan dokumen perencanaan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor ini bisa meliputi kompleksitas proses pengadaan, keterbatasan sumber daya, kendala teknis di lapangan, atau keterlambatan koordinasi dengan pihak terkait. Meskipun demikian, terlihat adanya upaya peningkatan anggaran pada beberapa kegiatan di tahun-tahun mendatang, yang mengindikasikan komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



## 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

**Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Masyarakat
		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.	Masyarakat
		Pengelolaan terminal penumpang tipe C.	Masyarakat
		Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.	Masyarakat, Tempat Usaha
		Pengujian berkala kendaraan bermotor.	Masyarakat, Pengemudi Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	Masyarakat
		Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.	Masyarakat, Swasta
		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.	Masyarakat
		Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat
		Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat
Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.	Masyarakat		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025



Tabel diatas mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan di berbagai bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Layanan ini difokuskan pada urusan dan NSPK yang ada di dalam urusan perhubungan. Setiap bidang memiliki sasaran yang spesifik, dari pemerintah daerah dan masyarakat luas, serta layanan yang berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Layanan yang disediakan Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki kualitas perhubungan, serta mendukung transportasi yang berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Setiap layanan yang disediakan berfokus pada sasaran yang spesifik, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga sektor swasta. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan kelembagaan merupakan kunci untuk mewujudkan keberhasilan layanan Transportasi yang lebih baik di Kabupaten Pacitan.

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan

**Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah**

Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Menyediakan data perencanaan pembangunan wilayah dan infrastruktur, serta mengintegrasikan rencana transportasi ke dalam tata ruang daerah.
Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur jalan dengan menyediakan marka, rambu, dan penerangan jalan yang memadai.
Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Melakukan pemeliharaan infrastruktur terminal dan penegakan ketertiban serta keamanan di area terminal.



Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Memproses dan menerbitkan izin resmi untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir sesuai regulasi yang berlaku.
Kepolisian Resor Pacitan dan Samsat	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait kepatuhan uji KIR serta pembaruan surat-surat kendaraan.
Kepolisian Resor Pacitan	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Membantu mengatur arus lalu lintas, menanggulangi kemacetan, dan melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Dinas Pekerjaan Umum dan DLH	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota	Menganalisis dan menyetujui dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek pembangunan yang memengaruhi lalu lintas.
Kepolisian Resor Pacitan	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota	Melaksanakan audit dan inspeksi lapangan untuk memastikan standar keselamatan di jalan raya terpenuhi.
Organisasi Angkutan Darat	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten/kota	Berkolaborasi dalam penyediaan armada angkutan umum yang layak dan sesuai standar, serta mengorganisir jadwal operasional.
Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Menyediakan data tata ruang dan perencanaan wilayah untuk penetapan zona layanan angkutan perkotaan.



Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
Bappeda, Kementerian Perhubungan	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Bekerja sama dalam menyusun rencana trayek yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*

Berdasarkan tabel mitra kerja Dinas Perhubungan terlihat adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan layanan. Masyarakat secara umum menjadi penerima manfaat dan juga dapat berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, terutama pada layanan terkait perhubungan. Keterlibatan beragam mitra ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memerlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan.

## **2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.



**Tabel 2.6 Dukungan BUMD**

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

## 2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

**Tabel 2.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

## 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kecelakaan Lalu Lintas yang tinggi	Angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi	1) Belum adanya pemanfaatan sistem



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			transportasi berbasis teknologi informasi 2) Minimnya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas 3) Rendahnya kesadaran dan disiplin berlalu lintas 4) Kurang optimalnya koordinasi dan sosialisasi dan penegakan peraturan
		Kurang optimalnya kinerja sarana dan prasarana lalu lintas	1) Kurang optimalnya sarana dan prasarana PJU 2) Tidak optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas di titik-titik padat atau rawan kecelakaan
2	Kurangnya ketersediaan angkutan umum	Belum optimalnya sistem jaringan angkutan umum	1) Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan 2) Belum optimalnya konektivitas antar sistem angkutan umum 3) Masih terdapat pelanggaran keselamatan

## 2.9 Telaah Proyek Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan

Adapun pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan diarahkan pada pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Informasi dan komunikasi)



2. Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan minapolitan, agropolitan, dan kawasan strategis lainnya
3. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis
5. Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
7. Peningkatan kualitas SDM melalui akses dengan pemerataan sarana prasarana Pendidikan dan pelayanan Kesehatan
8. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana.

Terdapat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan dimana perpres ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Peran kabupaten pacitan adalah Penyiapan Readiness Criteria, Fasilitasi Perijinan, Fasilitasi Kesesuaian Tata Ruang, Penyediaan Lahan dan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait. Adapun 7 proyek percepatan pembangunan kawasan Kabupaten Pacitan yang didukung Dinas Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Proyek Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan**

No.	Proyek	Kendala
1.	Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi	Perlu diusulkan dalam Musrenbang Provinsi Tahun 2025 dan Perlu koordinasi lebih lanjut terkait perubahan skema pembiayaan KPBU



No.	Proyek	Kendala
2.	Penataan Kawasan Geosite Pantai Klayar, Pantai Srau, Pantai Pancer Door	DAK Penugasan di Kawasan Pancer Door pelaksanaannya sudah mencapai 100 %, Untuk Srau dan Klayar penanganan akses dengan dana Inpres Jalan Daerah TA 2023 dan juga mengusulkan dalam DAK 2025, juga BK Provinsi TA 2024/2025
3.	Pembangunan Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	Perlu Koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan fisik
4.	Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Gelon/Pacitan	Perlu penyesuaian nilai proyek Pemerintah Kabupaten akan menginisiasi pendirian KEK di wilayah Kab. Trenggalek sehingga mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya Pelabuhan galon
5.	Pembangunan Aksesibilitas antar Kawasan di Geopark Gunungsewu dan KSPN	Perlu peningkatan status jalan dari jalan kabupaten menjadi Jalan Nasional, karena akses jalan termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Gunung-sewu sebagai Geopark UNESCO. • Perlunya penetapan lokasi prioritas tematik Geopark dalam DAK 2025
6.	Pembangunan Parapet dan Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Asemgando	Sungai Asem Gandok adalah kewenangan BBWS Bengawan Solo sehingga dalam rencana penanganan K/L tidak termasuk prioritas sehingga lambat dalam penanganannya. Lambatnya proses pengadaan lahan. Diusulkan dalam Perencanaan/ Renstra BBWS Bengawan Solo 2025- 2029 dengan nama paket Penanganan Banjir Sungai Asemgandok dan Anak Sungainya di



No.	Proyek	Kendala
		Kabupaten Pacitan pada tahun 2026-2027 dengan anggaran 63 Miliar
7.	Pengembangan Geopark Gunung Sewu	Sarpras pendukung dan penataan kawasan sangat kurang sebagai destinasi wisata yang masuk KSPN dan Geopark UNESCO dan Hingga saat ini belum ada kegiatan fisik sesuai yang direncanakan di tahun 2021

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan, 2025

## 2.10 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Perhubungan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

### 2.10.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Urbanisasi dunia
2. Perdagangan internasional
3. Disrupsi teknologi
4. Demografi global
5. Geopolitik dan geoekonomi



6. Penduduk kelas menengah
7. Persaingan sumber daya manusia
8. Perubahan Iklim
9. Tata Kelola Keuangan Global
10. Pemanfaatan Luar Angkasa

### 2.10.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

**Tabel 2.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam RPJMN 2025-2029**

Program Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	Meningkatnya Konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut, udara	Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal perkotaan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat SDM Bidang Transportasi	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Transportasi yang Berdaya Saing	Pengembangan SDM untuk peningkatan kinerja Layanan Transportasi

Sumber: Lampiran II RPJMN 2025-2029, 2025



### 2.10.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kabupaten Pacitan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah.



**Gambar 4.1 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur**  
*Sumber: RPJMN, 2025*

Adapun Kabupaten Pacitan diarahkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur, Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru

Pacitan-Trenggalek Tulungagung. Dengan prioritas intervensi sebagai berikut:



#### 2.10.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).



**Gambar 4.2 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029**

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan, 2025*

Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat



Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, yaitu Peningkatan Infrastruktur Daerah utamanya berkaitan dengan isu Transportasi.

#### **2.10.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2025-2029**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Dinas Perhubungan agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

#### **2.10.6 Potensi Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu



diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan antara lain:

1. Pacitan sebagai Kawasan pendukung Ekonomi Biru
2. Kawasan Swasembada Pangan, Ketahanan Air dan Energi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.10 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Provinsi Jawa Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pacitan sebagai Kawasan pendukung Ekonomi Biru 2. Kawasan Swasembada Pangan, Ketahanan Air dan Energi	1. Kecelakaan Lalu Lintas yang tinggi 2. Kurangnya ketersediaan Angkutan umum 3. Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Peningkatan Infrastruktur Daerah	a. Urbanisasi dunia b. Perdagangan internasional c. Disrupsi teknologi d. Demografi global e. Geopolitik dan geoekonomi f. Penduduk kelas menengah g. Persaingan sumber daya manusia h. Perubahan iklim i. Tata Kelola Keuangan Global	a. Konektivitas (Preservasi jalan ruas Madiun-Ponorogo-Pacitan) b. Pembangunan Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	a. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi b. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial c. Pengembangan SDM Berkualitas d. Tata Kelola pemerintahan dan Kepemimpinan e. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana f. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani	1. Optimalisasi konektivitas wilayah 2. Optimalisasi Pelayanan Bidang Perhubungan 3. Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat 4. Manajemen lalu lintas yang berkeselamatan 5. Jalan dan Kendaraan yang berkeselamatan



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Provinsi Jawa Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			j. Pemanfaatan Luar Angkasa			

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pacitan, 2025



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN  
ARAH KEBIJAKAN





### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pacitan yaitu **“Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pacitan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran. Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung **Misi ke-1 Pemberantasan Kemiskinan**, dengan sasaran berkurangnya kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya mendukung **Misi ke-3 Memajukan Pariwisata Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**, dengan sasaran meningkatnya infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan.



Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan pada sektor lain. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark menjadi salah satu modal dasar pengembangan pariwisata Pacitan. Sektor agraris sebagai penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Pacitan wajib untuk dimaksimalkan dengan pemetaan potensi baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Peningkatan kerjasama investasi dengan pihak lain untuk meningkatkan realisasi investasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, serta entrepreneur muda perlu untuk terus difasilitasi untuk bisa meningkatkan pendapatannya.

Percepatan pembangunan infrastruktur prioritas sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi masyarakat, penyediaan sarana air bersih dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Pembangunan infrastruktur berwawasan kawasan dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat jenis kebutuhan infrastruktur setiap wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif harus tetap menjaga dan mempertahankan lingkungan Pacitan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Pembangunan yang telah dilaksanakan harus dapat



menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.



**Gambar 2.2 Konstruksi Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029*

Tujuan dan Sasaran dalam mendukung visi tersebut antara lain: pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. NSPK Urusan Perhubungan -> Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Sasaran RPJMD Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
		Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	14,52	14,52	14,66%	14,82%	15,01%	15,18%	
			Persentase penurunan Kejadian Kecelakaan	1,69	1,69	1,5	1,5	1,31	1,31	
		Meningkatnya kualitas layanan tata kelola perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,00	90,64	91,00	91,40	91,89	92,00	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025

### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Sub Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka angkah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang



ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Alternatif Strategi**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	1. Optimalisasi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Lalu Lintas 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Pendukung Lalu Lintas 3. Penerapan Teknologi untuk Peningkatan Efisiensi dan Keamanan Lalu Lintas 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 5. Penguatan Regulasi dan Partisipasi Publik
	Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2025*

Berdasarkan tabel dapat dianalisis bahwa tabel ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan Dinas Perhubungan yang menjabarkan tujuan, sasaran, dan strategi utama. Tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana program-program dinas dirancang untuk mencapai visi yang lebih besar. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Perhubungan. Tujuan utama yang tertera dalam



tabel adalah "Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau". Tujuan ini adalah fondasi dari seluruh program kerja Dinas Perhubungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat dua sasaran utama yang harus dicapai:

- 1) Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sasaran ini berfokus pada aspek fisik dan teknis dari sistem transportasi, seperti jalan, rambu-rambu, dan fasilitas pendukung lainnya.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan tata kelola perangkat daerah. Sasaran ini berfokus pada aspek internal dinas, yaitu peningkatan kapabilitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, Dinas Perhubungan telah merumuskan lima strategi yang terperinci:

- a. Optimalisasi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Lalu Lintas yaitu Strategi ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan pembangunan yang efektif untuk prasarana transportasi.
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Pendukung Lalu Lintas yaitu Strategi ini berfokus pada ketersediaan dan kualitas fasilitas seperti rambu, marka jalan, dan penerangan jalan umum untuk menjamin keamanan.
- c. Penerapan Teknologi untuk Peningkatan Efisiensi dan Keamanan Lalu Lintas yaitu Strategi ini menunjukkan komitmen untuk mengadopsi teknologi modern, seperti sistem informasi dan pemantauan, untuk membuat layanan lebih efisien dan aman.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan yaitu Strategi ini menunjukkan pentingnya investasi pada SDM, yaitu dengan pelatihan dan



pengembangan kompetensi, untuk memastikan pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola sistem transportasi.

- e. Penguatan Regulasi dan Partisipasi Publik yaitu Strategi ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dari Dinas Perhubungan. Mereka tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut memahami bahwa layanan transportasi yang baik harus didukung oleh sistem yang kuat, bukan hanya infrastruktur semata.

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan**

<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket.</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> <li>3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li> <li>4. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.</li> <li>6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.</li> <li>7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah)</li> <li>2. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi</li> <li>3. Pemenuhan daya dukung infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan jalan lintas selatan dan pengembangan ekonomi biru</li> <li>4. Peningkatan kualitas sistem layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan prasarana dan fasilitas lalu lintas secara berkala, mencakup kondisi jalan, persimpangan, trotoar, halte, rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya.</li> <li>2. Menyusun masterplan dan rencana induk pengembangan lalu lintas jangka panjang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.</li> <li>3. Mengidentifikasi prioritas pembangunan dan rehabilitasi berdasarkan tingkat urgensi, kepadatan lalu lintas, dan potensi dampak terhadap kelancaran dan keselamatan.</li> </ol>	



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	<p>transportasi publik di internal kawasan perkotaan</p> <p>5. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis</p> <p>6. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis</p> <p>7. Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya</p>	<p>4. Mengembangkan standar teknis dan spesifikasi pembangunan prasarana dan fasilitas lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal.</p> <p>5. Memasang dan merehabilitasi rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL/traffic light) yang memenuhi standar teknis dan visual.</p> <p>6. Membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki (trotoar) dan pesepeda yang aman dan nyaman.</p> <p>7. Menyediakan dan meningkatkan kualitas halte bus/angkutan umum yang representatif dan mudah diakses.</p> <p>8. Mengembangkan sistem penerangan jalan umum (PJU) yang memadai di lokasi strategis dan rawan kecelakaan.</p> <p>9. Mengimplementasikan sistem informasi lalu lintas real-time untuk memantau kepadatan dan memberikan informasi kepada pengguna jalan.</p> <p>10. Mengembangkan sistem Area Traffic Control System (ATCS) untuk pengaturan lampu lalu lintas yang adaptif.</p> <p>11. Memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis untuk pemantauan dan penegakan hukum.</p> <p>12. Mengkaji dan mengimplementasikan teknologi cerdas lainnya seperti smart parking atau sistem deteksi pelanggaran.</p> <p>13. Melatih dan meningkatkan</p>	



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
		<p>kompetensi SDM di Dinas Perhubungan terkait perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas.</p> <p>14. Mengembangkan sistem manajemen aset prasarana dan fasilitas lalu lintas yang efektif.</p> <p>15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait (PUPR, Kepolisian, Dishub Provinsi/Pusat) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur lalu lintas.</p> <p>16. Mengkaji dan memperbarui peraturan daerah terkait standar prasarana dan fasilitas lalu lintas.</p> <p>17. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan prasarana lalu lintas melalui forum-forum publik</p> <p>18. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas lalu lintas dan tertib berlalu lintas.</p>	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025



**Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p><b>Penguatan Tata Kelola Transportasi Berkelanjutan untuk Aksesibilitas Optimal:</b> Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan layanan transportasi eksisting, Menyelaraskan peraturan daerah dengan regulasi provinsi dan nasional, Pelatihan dan peningkatan kompetensi staf Dishub dalam perencanaan, operasional, dan pengawasan, Perbaikan rute, jadwal, dan kondisi angkutan umum lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dengan Kampanye kesadaran, perbaikan rambu, marka jalan, dan penerangan jalan</p>	<p><b>Pengembangan Jaringan Transportasi Terpadu Penunjang Sektor Potensial Pembangunan :</b> Perbaikan Perlengkapan jalan menuju destinasi wisata, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, dan pengembangan moda transportasi wisata, Mendorong konektivitas antar moda, Pengembangan Sistem Informasi Transportasi</p>	<p><b>Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Perhubungan untuk Mobilitas Cerdas dan Efisien:</b> Penerapan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Monitoring Lalu Lintas, Pengembangan Transportasi Berbasis Non-Motor, Fasilitasi jalur sepeda, trotoar yang nyaman untuk pejalan kaki di area perkotaan, Kajian dan pilot project untuk penggunaan kendaraan listrik atau energi terbarukan pada transportasi publik, Sosialisasi penggunaan transportasi publik dan kesadaran berlalu lintas yang baik</p>	<p><b>Sinergi Regional dan Transportasi Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan:</b> Konektivitas Antar Kabupaten/Kota, Program uji emisi kendaraan, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, Pengembangan Transportasi Multi-moda, Pengelolaan Kebencanaan Transportasi, Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum</p>	<p><b>Mewujudkan Pacitan Sebagai Hub Transportasi Regional yang Inovatif dan Mandiri:</b> Pengembangan Transportasi Berbasis Data, Inovasi Berkelanjutan bidang Transportasi, Kerjasama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi.</p>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025

Lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek spasial yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas strategis yang ingin dicapai Kabupaten Pacitan. Penentuan lokus ini



bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah.

Penentuan lokus pembangunan juga memperhatikan dimensi arah kebijakan yang termuat dalam visi dan misi pembangunan yang telah dijabarkan pada “bab” sebelumnya. Dimensi yang menjadi pertimbangan utama meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan pariwisata, pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitasnya, serta reformasi birokrasi. Setiap wilayah akan dianalisis berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pencapaian dimensi-dimensi tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam proses penetapannya, lokus pembangunan akan ditentukan melalui mekanisme skoring berdasarkan tingkat urgensi dan potensi setiap wilayah dalam memenuhi indikator pembangunan. Pendekatan skoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

Berdasarkan hasil analisis skoring yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategis, seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan pariwisata, pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur, serta reformasi birokrasi, diperoleh pemetaan lokus pembangunan di Kabupaten Pacitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokus utama terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Donorojo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, dan Ngadirojo. Lokus menengah mencakup lima kecamatan, yaitu Punung, Arjosari, Nawangan,



Tegalombo, dan Sudimoro, sementara lokus pendukung tidak ditemukan dalam pemetaan ini.

Penentuan lokus ini bertujuan untuk mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan tingkat urgensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga strategi pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

#### Lokus Utama

7 (Tujuh) kecamatan yang masuk dalam kategori lokus utama yaitu : Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Tulakan, dan Kecamatan Ngadirojo memiliki potensi dan permasalahan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih krusial dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan ini difokuskan untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi kecamatan di sekitarnya. Prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan pada:

- a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas guna mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk;
- b. Pengembangan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah;
- c. Penguatan infrastruktur dasar dan layanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik.

#### **Lokus Menengah**

5 (Lima) kecamatan yang tergolong dalam lokus menengah yaitu : Kecamatan Punung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo, dan Kecamatan Sudimoro memiliki potensi yang cukup baik, namun masih memerlukan

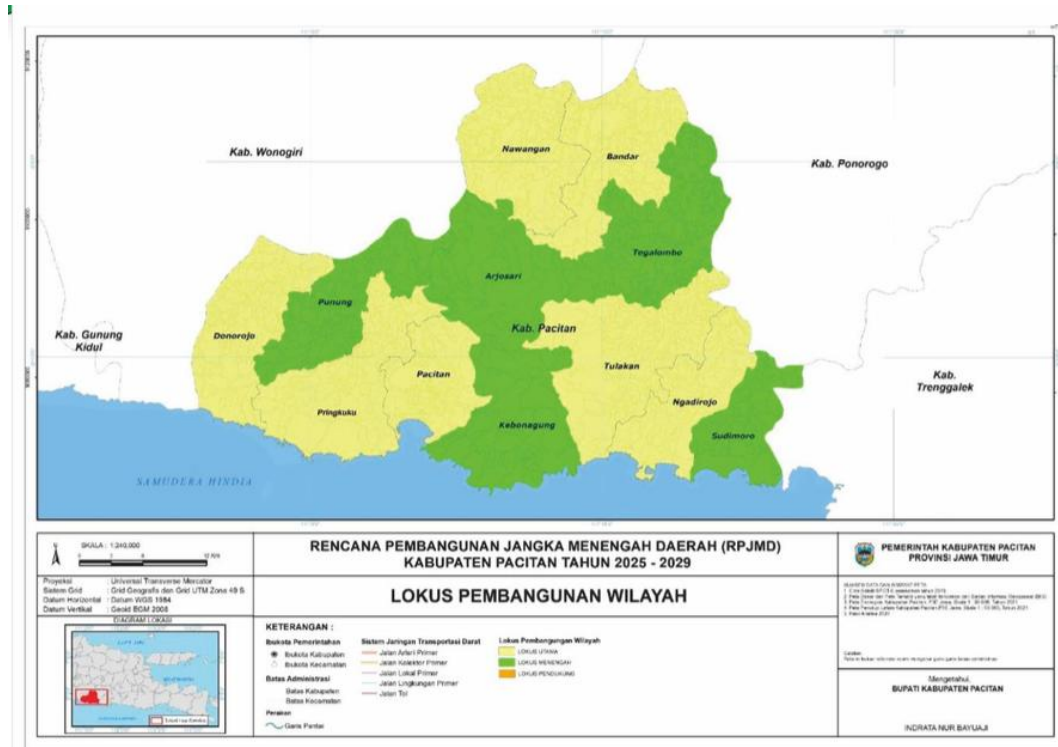


penguatan dalam beberapa aspek, seperti infrastruktur, konektivitas, serta optimalisasi sektor ekonomi tertentu. Pembangunan di wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat sejajar dengan kecamatan dalam lokus utama. Strategi pembangunan di wilayah ini mencakup:

- A. Peningkatan konektivitas antarwilayah dan penguatan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- B. Optimalisasi potensi ekonomi lokal sesuai dengan potensi spesifik masing- masing kecamatan,
- C. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial

#### **Lokus Pendukung (Tidak Ada)**

Dalam analisis ini, tidak ditemukan kecamatan yang masuk dalam kategori lokus pendukung. Biasanya, kategori ini mencakup wilayah dengan prioritas pembangunan lebih rendah. Ketiadaan lokus pendukung menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang dianalisis memiliki permasalahan yang cukup krusial dan potensi yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah sebaran pembagian lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan :



**Gambar 3.1** Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan  
*Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan, 2025*

Langkah selanjutnya menselaraskan antara janji politis dengan program prioritas, serta dengan menyinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis kepala daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan ataupun kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan menteri Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



**Tabel 3.5 Dukungan Program Prioritas Kepala Daerah**

Sasaran	Outcome	Program Politis	Program SIPD
Meningkatnya Kelestarian Berkelanjutan Infrastruktur dan Lingkungan yang	Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Pembangunan Infrastruktur Prioritas Pemerintah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
	Terpenuhinya Prasarana Terminal Tipe C		
	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas		
	Meningkatnya Pelayanan Pengujian		

*Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan, 2025*

Dinas Perhubungan (Dishub) Pacitan memiliki peran strategis dalam mendukung prioritas kepala daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan perekonomian. Yang Pertama Dukungan pada Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. Dukungan utama Dishub Pacitan terhadap prioritas kepala daerah terfokus pada perbaikan dan pengelolaan infrastruktur transportasi. Sasaran utamanya adalah memastikan mobilitas barang dan jasa berjalan lancar, yang merupakan kunci untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dishub tidak hanya berperan dalam pengawasan dan penertiban, tetapi juga dalam perencanaan teknis terkait pembangunan perlengkapan jalan, jembatan, dan sarana transportasi publik. Mereka juga aktif dalam sosialisasi keselamatan lalu lintas dan penertiban angkutan, yang secara langsung mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan, sejalan dengan sasaran pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Peran kedua dalam Peningkatan Sektor Pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu andalan Pacitan. Dalam hal ini, Dishub berperan penting untuk mendukung keberhasilan sektor ini dengan memastikan aksesibilitas ke destinasi wisata. Mereka berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengidentifikasi kebutuhan transportasi, memastikan angkutan wisata memenuhi standar kelayakan, dan menyediakan rambu-rambu petunjuk yang memadai. Dengan adanya dukungan ini, wisatawan merasa lebih nyaman dan aman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan daerah. Ini adalah contoh nyata



bagaimana peran Dishub tidak hanya terbatas pada teknis lalu lintas, tetapi juga memiliki dampak langsung pada perekonomian lokal.

Yang ketiga Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor. Keberhasilan program kepala daerah tidak bisa dicapai oleh satu dinas saja. Dishub Pacitan menunjukkan dukungannya melalui sinergi dan kolaborasi yang erat dengan instansi lain. Mereka bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perencanaan dan pemeliharaan jalan, serta dengan Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Hubungan antar-dinas ini sangat krusial dalam menciptakan sistem yang terintegrasi, memastikan setiap program terlaksana secara efisien, dan mendukung visi kepala daerah untuk membangun Pacitan yang lebih baik.



# BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



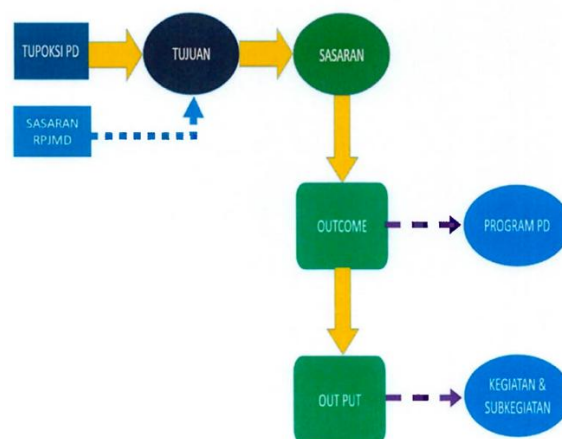


## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan angka operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perhubungan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan. Berikut merupakan Kerangka prumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.



#### Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

*Sumber: Inmendagri 2 Tahun 2025*



Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat Teknik merumuskan program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>NSPK: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>  <b>Sasaran RPJMD yang Relevan: Meningkatnya Infrastruktur Dan Kelestarian Lingkungan Yang Berkelanjutan</b>	<b>Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau</b>				Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkatnya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</b>			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	
					Persentase penurunan Kejadian Kecelakaan	
			<b>Terlaksananya program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>		Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas	Persentase tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas
				Terpenuhinya prasarana terminal tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe C	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
				Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan dengan kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					<b>Tersedianya prasarana Terminal yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
					<b>Jumlah rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					<b>Prosentase penurunan Kejadian Kecelakaan</b>	
					<b>Persentase penataan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
					<b>Terlaksananya pelayanan uji berkala</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p><b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
						<p><b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
						<p><b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>
						<p><b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b></p> <p>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>
						<p><b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b></p> <p>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>
						<p><b>Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C</b></p> <p>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>
						<p><b>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b></p>



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		<b>Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</b>	
			<b>Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>
				<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				<b>Meningkatnya akuntabilitas laporan barang milik daerah</b>	<b>Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				<b>Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>Presentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				<b>Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Operasional Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang tugas dan fungsi dalam kondisi baik</b>	<b>Prosentase Laporan Barang Milk Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima



tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat Rencana Program / Kegiatan/ Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTPUT/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Urusan Perhubungan						6.403.418.509		6.723.589.000		6.992.533.000		7.272.234.000		7.763.124.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>73,55</b>	<b>70,95</b>	<b>71</b>	<b>4.677.475.259</b>	<b>71,3</b>	<b>4.911.349.000</b>	<b>71,5</b>	<b>5.107.803.000</b>	<b>71,8</b>	<b>5.312.115.000</b>	<b>72</b>	<b>5.524.600.000</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen	23 dokumen	22 dokumen	46.000.000	22 dokumen	53.000.000	22 dokumen	65.000.000	22 dokumen	75.000.000	22 dokumen	95.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	30.000.000	9 dokumen	35.000.000	9 dokumen	40.000.000	9 dokumen	45.000.000	9 dokumen	55.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	13 Laporan	16.000.000	13 Laporan	18.000.000	13 Laporan	25.000.000	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	40.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	3.887.953.259	59 dokumen	3.888.807.000	59 dokumen	3.892.952.000	59 dokumen	3.897.952.000	59 dokumen	3.902.953.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	36 orang	3.872.953.259	36 orang	3.872.807.000	36 orang	3.872.952.000	36 orang	3.872.952.000	36 orang	3.872.953.000	



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semester an SKPD	45 laporan	45 laporan	45 laporan	15.000.000	45 laporan	16.000.000	45 laporan	20.000.000	45 laporan	25.000.000	45 laporan	30.000. 000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan</b>	0	0	20 laporan	5.000.000	20 laporan	6.000.000	20 laporan	7.000.000	20 laporan	8.000.000	20 laporan	10.000. 000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	20 laporan	5.000.000	20 laporan	6.000.000	20 laporan	7.000.000	20 laporan	8.000.000	20 laporan	10.000. 000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian</b>	100%	100%	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	110.00 0.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	3 paket	2 paket	80.000.000	2 paket	90.000.000	2 paket	95.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	110.00 0.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya tertib administrasi dan efisiensi layanan umum perangkat daerah</b>	<b>Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100%	100%	100%	270.522.000	100%	427.542.000	100%	511.851.000	100%	621.163.000	100%	735.64 7.000	



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2 paket	2 paket	6.522.000	2 paket	7.542.000	2 paket	8.500.000	2 paket	10.163.000	2 paket	15.000. 000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	5 paket	5 paket	100.000.000	5 paket	147.000.000	5 paket	200.000.000	5 paket	240.000.000	5 paket	275.64 7.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2 paket	3 paket	100.000.000	3 paket	173.000.000	3 paket	173.351.000	3 paket	211.000.000	3 paket	245.00 0.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	64.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	130.000.000	12 laporan	160.000.000	12 laporan	200.00 0.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>318.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>376.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>441.00 0.000</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	138.000.000	12 laporan	145.000.000	12 laporan	160.000.000	12 laporan	180.000.000	12 laporan	196.00 0.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	180.000.000	12 laporan	215.000.000	12 laporan	216.000.000	12 laporan	230.000.000	12 laporan	245.00 0.000	



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	80%	70.000.000	80%	86.000.000	80%	160.000.000	80%	200.000.000	80%	230.00 0.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	23 unit	60.000.000	23 unit	66.000.000	23 unit	110.000.000	23 unit	125.000.000	23 unit	130.00 0.000	
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	0	0	1 gedung	10.000.000	1 gedung	20.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	75.000.000	1 gedung	100.00 0.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas	Persentase tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas	0	14,25	14,26	535.943.250	14,41	562.240.000	14,56	574.730.000	14,76	610.119.000	14,92	808.52 4.000	
	Terpenuhinya prasarana Terminal tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraa n terminal tipe C	0	62,29	62,86	160.000.000	63,43	180.000.000	63,43	200.000.000	64	210.000.000	64	220.00 0.000	
	Menurunnya pelanggaran lalu lintas	Persentase penataan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas	0	72,59	73,33	880.000.000	74,07	900.000.000	75,19	920.000.000	75,93	940.000.000	76,67	1.000. 000.00 0	

### RENCANA STRATEGIS

### DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN 85

TAHUN 2025-2029



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
	Meningkatnya pelayanan pengujian	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	76,82	77,37	150.000.000	77,92	170.000.000	78,47	190.000.000	79,02	200.000.000	79,57	210.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Jumlah perlengkapan jalan dengan kondisi baik	1087 unit	1087 unit	1088 unit	285.000.000	1090 unit	305.000.000,00	1093 unit	312.000.000,00	1097 unit	332.000.000,00	1102 unit	460.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	50.000.000,00	2 unit	55.000.000,00	3 unit	57.000.000,00	4 unit	65.000.000,00	5 unit	120.000.000,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	600 unit	600 unit	680 unit	235.000.000,00	760 unit	250.000.000,00	840 unit	255.000.000,00	920 unit	267.000.000,00	1000 unit	340.000.000,00	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal dalam kondisi baik dan layak fungsi	Jumlah prasarana terminal yang berfungsi baik	5 unit	5 unit	4 unit	160.000.000	4 unit	180.000.000,00	4 unit	200.000.000,00	4 unit	210.000.000,00	4 unit	220.000.000,00	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 unit	1 unit	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 unit	5 unit	1 unit	155.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	1 unit	185.000.000,00	1 unit	190.000.000,00	1 unit	195.000.000,00	



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir berizin</b>	<b>Jumlah unit kendaraan yang terlayani dengan baik</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>316.000 unit</b>	<b>800.000.000</b>	<b>316.100 unit</b>	<b>813.000.000</b>	<b>316.200 unit</b>	<b>826.000.000</b>	<b>316.300 unit</b>	<b>836.000.000</b>	<b>316.400 unit</b>	<b>874.000.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	800.000.000,00	12 laporan	813.000.000,00	12 laporan	826.000.000,00	12 laporan	836.000.000,00	12 laporan	874.000.000,00	
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Terlaksananya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan</b>	<b>Jumlah alat uji yang representatif</b>	<b>9 unit</b>	<b>9 unit</b>	<b>9 unit</b>	<b>150.000.000</b>	<b>9 unit</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>9 unit</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>9 unit</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>9 unit</b>	<b>210.000.000,00</b>	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 dokumen	3500 dokumen	3525 dokumen	30.000.000,00	3550 dokumen	35.000.000,00	3575 dokumen	40.000.000,00	3600 dokumen	45.000.000,00	3625 dokumen	50.000.000,00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit	9 unit	120.000.000,00	9 unit	135.000.000,00	9 unit	150.000.000,00	9 unit	155.000.000,00	9 unit	160.000.000,00	

### RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN 87

TAHUN 2025-2029



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas</b>	0 kegiatan	0 kegiatan	5 laporan	253.943.250	5 laporan	261.240.000	5 laporan	267.730.000	5 laporan	284.119.000	5 laporan	356.524.000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	5 laporan	3.000.000	5 laporan	4.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	6.000.000	5 laporan	8.000.000	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	250.943.250	4 dokumen	257.240.000	4 dokumen	262.730.000	4 dokumen	278.119.000	4 dokumen	348.524.000	
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)</b>	<b>Jumlah rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)</b>	1 kegiatan	1 kegiatan	4 laporan	2.000.000	4 laporan	3.000.000	4 laporan	4.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	8.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 laporan	1 laporan	4 laporan	2.000.000	4 laporan	3.000.000	4 laporan	4.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	8.000.000	



## DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	Outcome (Program)/ Output (Kegiatan-Sub Kegiatan)	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) secara berkala	Jumlah laporan sosialisasi, pengawasan serta pengaturan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	0	0	12 laporan	75.000.000,00	12 laporan	80.000.000,00	12 laporan	85.000.000,00	12 laporan	93.000.000,0 0	12 lapora n	110.00 0.000, 00	
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0	0	12 laporan	75.000.000,00	12 laporan	80.000.000,00	12 laporan	85.000.000,00	12 laporan	93.000.000,0 0	12 laporan	110.00 0.000,0 0	

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*



**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas</li><li>2. Terpenuhinya Prasarana Terminal Tipe C</li><li>3. Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas</li><li>4. Meningkatnya Pelayanan Pengujian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li><li>2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</li><li>3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li><li>4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li><li>5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li><li>6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</li><li>7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</li></ol>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Pacitan selaras mendukung Prioritas Kepala Daerah mengenai Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Sektor Perhubungan untuk mendukung Konektivitas Wilayah di Kabupaten Pacitan.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diemban oleh Dinas Perhubungan, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang secara strategis untuk menghasilkan empat outcome kunci yang saling terkait. Pertama, peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas, yang secara langsung berkontribusi pada



penurunan angka kecelakaan. Kedua, pemenuhan prasarana Terminal Tipe C, yang menjadi sentra vital dalam mobilitas masyarakat. Ketiga, penurunan pelanggaran lalu lintas, yang mencerminkan tingkat kesadaran dan disiplin pengguna jalan. Terakhir, peningkatan pelayanan pengujian kendaraan, yang menjamin kelaikan kendaraan bermotor di jalan.

Untuk mencapai outcome tersebut, dinas telah merumuskan serangkaian Kegiatan/Sub Kegiatan yang terperinci. Ini meliputi Penyediaan Perlengkapan Jalan, yang merupakan langkah dasar dalam melengkapi infrastruktur keselamatan. Lalu, ada Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang memastikan kelancaran operasional transportasi publik. Kegiatan strategis lainnya adalah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang bertujuan untuk mengoptimalkan arus kendaraan dan mengurangi kemacetan. Terakhir, Audit dan Inspeksi Keselamatan serta Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menunjukkan komitmen dinas dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu secara rutin.

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan mengilustrasikan sebuah pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Keterangan pada tabel menegaskan bahwa seluruh program ini selaras dengan prioritas Kepala Daerah, khususnya dalam membangun infrastruktur perhubungan untuk mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Pacitan. Ini membuktikan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga memainkan peran krusial sebagai agen pembangunan yang mendukung visi besar pemerintah daerah.

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
2.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	%	14,52	14,52	14,66%	14,82%	15,01%	15,18%	
3.	Persentase penurunan Kejadian Kecelakaan	%	1,69	1,69	1,5	1,5	1,31	1,31	
4.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	90,00	90,64	91,00	91,40	91,89	92,00	

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*

Untuk memastikan tujuan strategis Dinas Perhubungan dapat dicapai secara terukur, setiap program dan kegiatan diterjemahkan ke dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi besar dinas dengan implementasi di lapangan. Setiap IKK ini memiliki target tahunan yang terperinci. Dengan adanya IKK ini, dinas dapat memantau progres, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil keputusan yang tepat agar semua sasaran dapat terwujud sesuai target yang ditetapkan, sekaligus memastikan tujuan layanan



transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau dapat tercapai secara efektif dan efisien.

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
2.	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	14,25%	14,26%	14,41%	14,56%	14,76%	14,92%	
3.	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025*



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB V

## PENUTUP





## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 telah berhasil mengintegrasikan secara sinergis tujuan, sasaran, dan program strategis dinas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas Kepala Daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Pacitan. Dengan berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra ini menjadi acuan utama dalam alokasi sumber daya dan pelaksanaan program, memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan



komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan.

## **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Renstra ini akan berlandaskan pada kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Setiap program, mulai dari optimalisasi infrastruktur pendukung perhubungan hingga peningkatan kualitas layanan, akan diawasi secara ketat dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sector perhubungan, sementara persentase kelengkapan fasilitas jalan akan memotret tingkat keselamatan. Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi kaidah operasional yang tak terpisahkan. Dinas Perhubungan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Mitra Perangkat Daerah seperti Dinas PUPR untuk perencanaan jalan, Dinas Pariwisata untuk aksesibilitas destinasi wisata, serta Kepolisian untuk penegakan hukum lalu lintas. Lebih dari itu, partisipasi publik akan didorong melalui mekanisme konsultasi dan umpan balik agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.



### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah nyata dari dokumen strategis ini, Dinas Perhubungan akan segera memulai tahapan implementasi dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang lebih operasional dan terperinci. Setiap program prioritas akan dipecah menjadi kegiatan-kegiatan konkret dengan alokasi anggaran yang jelas. Monitoring dan evaluasi akan menjadi siklus rutin yang dilakukan secara berkala, minimal setiap triwulan, untuk membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Laporan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar utama untuk perbaikan berkelanjutan, memungkinkan dinas untuk melakukan penyesuaian strategi dan taktik jika ditemukan hambatan atau perubahan kondisi di lapangan. Dengan demikian, Renstra ini bukan sekadar dokumen statis, melainkan instrumen dinamis yang akan terus beradaptasi demi mewujudkan tujuan transportasi yang efektif dan efisien di Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 19 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198809 1 001



**BerAKHLAK** **#** bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

